



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
BALANGAN



---

DAFTAR ISI	
	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD .....	9
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan SKPD .....	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD .....	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	14
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja SKPD .....	15
3.3 Program Dan Kegiatan .....	15
3.4 Program Dan Kegiatan .....	16
BAB IV PENUTUP .....	19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Balangan Tahun 2023, memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2023) dan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karenanya kami berharap saran serta masukan dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan lebih baik dan terarah.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, Juli 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

**NOOR ASPARIAH, SP.MP**

Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19660613 199802 2 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 2021-2026. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 juga dirumus untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 di mulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 2023 di dasarkan atas pertimbangan - pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

RENJA Perubahan Satpol PP Tahun 2023 memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan rencana Program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2 Landasan hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 Tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan ke empat atas peraturan Bupati Balangan Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Dan Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026;

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 di lakukan setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;

- 2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II.
- 3. Penambahan Program dan Kegiatan yang mendukung Pengamanan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.

Penyusunan Renja-P SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan arahan atau acuan bagi pelaksana program dan kegiatan guna tercapainya sasaran dan perencanaan pembangunan dan memfasilitasi dan upaya bagi pencapaian visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun visi dan misi dari Renstra adalah sebagai berikut :

**“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”**

Dan misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.
- 2. Meningkatkan Perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
- 4. Meningkatkan Kualitas dan layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
- 5. Mewujudkan kehidupan sosial, Budaya dan agama serta Pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

**BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2023 yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2023.

**BAB IV. PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Balangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat daerah
- e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

##### **2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah kabupaten/ Kota.
- b. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota.



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun berjalan (n) yg di evaluasi 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SOPD (%)	
A	MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Akuntabilitas Kinerja ( Nilai Sakip)	72,4		7.864.140.329	73,6	4.291.192.448	50	48,56
		SEKRETARIAT		K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Sampaikan Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	Persen	186.606.400	50%	75.150.452	50	40,27
2	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerahn	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43	Orang/ Bulan	5.769.424.429	40	3.265.597.327	50	56,6
3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	675,064,600	6	411.716.000	50	60,99
4	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkar Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	12	Bulan	357,047,700	6	181.398.100	50	50,81
5	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	353,767,400	6	175.065.500	50	49,49
6	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	PenyediaanJasa Penunjang urusan Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	134,814,700	6	44.814.479	50	33,24
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahj Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	387,415,100	6	137.450.590	50	35,48
Capaian									56,15	46,7
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah

Alokasi anggaran pada Program ini sebesar Rp.7.864.140.329,- dan realisasi sampai dengan triwulan II 2023 sebesar Rp. 4.291.192.448,-

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun berjalan (n) yg dievaluasi 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD sd Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SOPD (%)	
1	2	3	4	5			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
B	Mdeningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22	Angka Pelanggaran	6,405,330,000	10	2.461.161.240	154,55	38,42
1	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	750	Kegiatan	5,936,770,000	615	2.343.449.240	82	39,47
2	Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / wali kota	Jumlah Peraturan Daerah yang di tagakkan	24	Perda	468,560,000	12	117.712.000	50,00%	25,12
Capaian									66	32,3
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah

Program Peningkatan Keamanan dan Ketenteraman umum alokasi dana sebesar Rp. 6,405,330,000,- dan realisasi sampai triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 2.461.161.240. Pada ke 2 (Dua) program diatas menunjukkan pencapaian predikat kinerja masih **sangat rendah**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu sasaran Strategis yaitu, “ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF” hal tersebut dalam pelaksanaan nya juga dijadikan sebagai indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat di lihat dalam table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Capaian	Realisasi s/d triwulan II tahun 2023	Capaian s/d triwulan II tahun 2023
1.	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban Masyarakat	22 Angka Pelanggaran	10 Angka Pelanggaran	154,55%

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan SOPD mengacu pada SPM TRANTIBUMLINMAS yaitu jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada, dan sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelayanan SPM trantibumlinmas dapat di lihat pada tabel berikut :

Perkembangan, Penerapan Dan Pencapaian  
Standar Pelayanan Minimal s/d Triwulan II Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian 2023	Capaian Sampai Semester II Tahun 2023
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	22 Orang	10 Orang

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SOPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2023 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SOPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk Mewujudkan KAMTIBMAS dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif. Penciptaan kondisi kondusif dalam pengertian tentram dan tertib merupakan tugas dan tanggung jawab baik itu oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan maka tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi , hal itu tercermin dari terciptanya sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Adanya Pemilu dan Pemilukada 2024.
2. Standar SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangf masih sangat terbatas
4. Disamping itu dalam pelaksanaan operasional kegiatan Satpol PP tetap melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan merupakan salah satu dari unsur garda terdepan dalam penegakan Perda dan Perkada.
5. Dalam pelaksanaan operasional sarana penunjang masih belum memadai, sehingga kegiatan dirasakan masih belum optimal sebagaimana diharapkan.
6. Secara ekstern, kondisi masyarakat kita masih belum optimal dalam mendukung program yang dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal.
7. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
8. Kurangnya kesadaran Dari Masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah yang dilaksanakan
9. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

Adapun hal – hal yang perlu di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Perda dan Perkada belum optimal sehingga perlu di tingkatkan kerjasama dengan TNI,Polri dan Instansi Terkait.
2. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Anggota Linmas Dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lingkungan Masyarakat masih rendah sehingga perlu Meningkatkan Rasio Petugas Linmas yang terdidik danTerlatih
3. Memastikan Keadaan Menjelang Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 tetap aman dan damai.

Dari uraian tersebut menjadi bahan bagi SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dimana peningkatan kerjasama dalam sosialisasi bersama Polri, TNI dan instansi terkait, mengikutsertakan anggota satpol pp dan Anggota Linmas dalam berbagai pelatihan dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan peraturan Bupati menjadi fokus kami untuk dilaksanakan di tahun mendatang.

Sedangkan beberapa peluang yang terkait dengan peningkatan keamanan yang perlu di cermati di antaranya adalah:

- a. Adanya Dukungan masyarakat  
Dengan adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah maka dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Adanya Kerjasama  
Pola Kerjasama adalah salah satu usaha untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah.
- c. Adanya Dukungan Pemerintah daerah  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah baik dari administrasi maupun teknis.

#### **2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

<div> <div>MATRIK ASISTENSI RENJA PERUBAHAN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</div> <div>KABUPATEN BALANGAN</div> </div>											
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN						
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Menurunnya Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Menurunnya Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Angka Pelanggaran Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	14.269.470.329	Angka Pelanggaran Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	16.620.388.829	(2.350.918.500)	Bertambah	SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai Sakip)	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,40	7.864.140.329	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai Sakip)	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,40	8.861.431.629	(997.291.300)		SATPOL PP
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitas Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	186.606.400	Persentase Fasilitas Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	186.606.400	-		SATPOL PP
Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	116.654.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	116.654.400	-		SATPOL PP
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.671.200	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.671.200	-		SATPOL PP
Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	49.280.800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	49.280.800	-		SATPOL PP
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Orang /Bulan	5.769.424.429	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Orang /Bulan	6.279.924.429	(510.500.000)		SATPOL PP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/ bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 Orang /Bulan	5769424429	Jumlah Orang/ bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 Orang / Bulan	6.279.924.429	(510.500.000)	Kenaikan Tunjangan ASN	SATPOL PP
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	675.064.600	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	786.664.600	(111.600.000)		SATPOL PP
Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	605.014.600	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	635.014.600	(30.000.000)	Pakaian Olahraga Drumband	SATPOL PP
Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	70.050.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	151.650.000	(81.600.000)	Study Banding Drumband	SATPOL PP

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	357.047.700	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	364.722.300	(7.674.600)		SATPOL PP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	53.880.600	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	61.555.200	(7.674.600)	Plakat & uang pembinaan Agen Perubahan	SATPOL PP
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	21.547.100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	21.547.100	-		SATPOL PP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	8.580.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	8.580.000	-		SATPOL PP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	273.040.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	273.040.000	-		SATPOL PP
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	353.767.400	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	681.937.400	(328.170.000)		SATPOL PP
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	110.000.000	(110.000.000)	3 Buah @35.000.000,-	SATPOL PP
Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	353.767.400	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	571.937.400	(218.170.000)	Laptop 5 Buah,Printer 5 Buah, Alat drumband , 2 Buah Tablet	SATPOL PP
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	134.814.700	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	134.814.700	-		SATPOL PP
Penyediaan Jasa Kumonikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	134.814.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	134.814.700	-		SATPOL PP
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	387.415.100	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	426.761.800	(39.346.700)		SATPOL PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Unit	372.315.100	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Unit	411.661.800	(39.346.700)	BBM & Pelumas	SATPOL PP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Unit	15.100.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Balangan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Unit	15.100.000	-		SATPOL PP

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Angka Pelanggaran	6.405.330.000	Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Angka Pelanggaran	7.758.957.200	(1.353.627.200)		SATPOL PP
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kegiatan	5.936.770.000	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kegiatan	7.265.357.200	(1.328.587.200)		SATPOL PP
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 kasus	5.409.594.000	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Kasus	6.678.671.200	(1.269.077.200)	Kenaikan Gaji THL 222 Orang X 12 Bulan X Rp.300.000.000, BPJS,JKM,JKK, Makan Minum Rp.13.500.000,-dan SPPD Luar Daerah @ 24.480.000	SATPOL PP
Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	457.176.000	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	457.176.000	-		SATPOL PP
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	70.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	129.510.000	(59.510.000)	Seminar Kit @ 9.215.000,-, Souvenir @ 1.000.000 Paket Meeting @ 17.500.000 dan SPPD @ 31.700.000	SATPOL PP
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Jumlah Perda Dan perkara yang di Tegakkan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Perda	468.560.000	Jumlah Perda Dan perkara yang di Tegakkan	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Perda	493.600.000	(25.040.000)		SATPOL PP
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	56.340.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	74.390.000	(18.050.000)	Jasa Penyiaran Radio @ 18.000.000	SATPOL PP
Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	412.220.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Kab.Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	419.210.000	(6.990.000)	Jasa pemberkasan Tindak Pidana @6.800.000,	SATPOL PP

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan maupun keluhan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat diperoleh melalui beberapa cara yaitu, penyampaian langsung kepada petugas maupun melalui telepon. Beberapa usulan yang di inginkan oleh masyarakat sebagian besar berharap bahwa adanya peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat di kabupaten Balangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganSatuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan



### BAB III

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

##### 3.1. Telaahan Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap penegakan Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten balangan tahun 2021-2026, Maka di peroleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum yaitu isu kondusivitas dan Stailitas daerah. Hal ini di dapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung Sosial Ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi beberapa dampak sosial masyarakat yaitu Meningkatnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Dapat di lihat dengan menurunnya kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta optimalisasi peningkatan kapasitas anggota linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada.

Untuk lebih jelasnya mengenai dampak sosial ekonomi dari penegakan perda dan perkada dapat di lihat dalam tabel Berikut :

NO	KEGIATAN	DAMPAK SOSIAL	DAMPAK EKONOMI
1	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Terwujudnya masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Kondisi daerah yang aman dan tertib serta demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi masuk ke daerah
2	SOSIALISASI PERDA DAN PERKADA	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	
3	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelayanan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meningkat	

### 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam permendagri 27 Tahun 2014 dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui :

1. Penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten /Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial maupun penindakannya yustisial.
2. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peningkatan tersebut untuk mewujudkan rasa tentram dan damai masyarakat Balangan dengan meningkatkan kesiagaan anggota Polisi Pamong Praja dalam menanggapi keadaan di lapangan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan pemahaaman tentang kenyamanan dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.
2. Menciptakan keamanan , ketertiban dan ketentraman lingkungan sesuai dengan perundang-undangan bagi masyarakat.
3. Mengikutsertakan aparat Satpol PP dalam berbagai pelatihan dan pendidikan supaya terpenuhi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja yang berkualitas.
4. Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi bersama POLRI, TNI dan instansi terkait.

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2023 adalah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam menghadapi pemilu dan Pemilukada tahun 2024 agar berjalan lancar aman damai dan kondusif.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah berdasarkan evaluasi kerja sampai triwulan II tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa

target kinerja secara umum adalah Meningkatkan Keamanan an Ketertiban Umum Serta Kenyamanan Lingkungan . Di samping sasaran – sasaran yang yang sudah ditetapkan meliputi terciptanya tertib administrasi, terciptanya situasi kondusif dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, terciptanya tugas operasional secara efektif dan efisien.

#### **3.4 Program dan Kegiatan**

Sebagaimana dikatakan bahwa tujuan dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat. Satuan Polisi mempunyai 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, yang sebelum Renja Perubahan tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, dengan penambahan biaya sebesar Rp 2.350.918.500,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Untuk Lebih Jelasnya dapat di Lihat pada Tabel Berikut :

PENAMBAHAN PAGU SETELAH PERUBAHAN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
KABUPATEN BALANGAN				
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Jumlah Penambahan(+/-)
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.269.470.329	16.620.388.829	(2.350.918.500)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.864.140.329	8.861.431.629	(997.291.300)
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	186.606.400	186.606.400	-
	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	116.654.400	116.654.400	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.671.200	20.671.200	-
	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	49.280.800	49.280.800	-
2	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	5.769.424.429	6.279.924.429	(510.500.000)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5769424429	6.279.924.429	(510.500.000)
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	675.064.600	786.664.600	(111.600.000)
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	605.014.600	635.014.600	(30.000.000)
	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	70.050.000	151.650.000	(81.600.000)
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	357.047.700	364.722.300	(7.674.600)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.880.600	61.555.200	(7.674.600)
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	21.547.100	21.547.100	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.580.000	8.580.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	273.040.000	273.040.000	-
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	353.767.400	681.937.400	(328.170.000)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		110.000.000	(110.000.000)
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bamgunan lainnya	353.767.400	571.937.400	(218.170.000)
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.814.700	134.814.700	-
	Penyediaan Jasa Kumonikasi sumber daya air ,dan Listrik	134.814.700	134.814.700	-
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	387.415.100	426.761.800	(39.346.700)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	372.315.100	411.661.800	(39.346.700)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000	15.100.000	-

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.405.330.000	7.758.957.200	(1.353.627.200)
8	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	5.936.770.000	7.265.357.200	(1.328.587.200)
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan	5.409.594.000	6.678.671.200	(1.269.077.200)
	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	457.176.000	457.176.000	-
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	70.000.000	129.510.000	(59.510.000)
9	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	468.560.000	493.600.000	(25.040.000)
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	56.340.000	74.390.000	(18.050.000)
	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	412.220.000	419.210.000	(6.990.000)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dibuat dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan dengan mengacu RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam merumuskan program dan kegiatan perubahan tahun 2023. Seluruh perubahan yang terjadi dalam Program dan Kegiatan tahun 2023 telah dipertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2023.

Harapan kami Pada Rencana Kerja Perubahan ini Kondisi, Sosial, Ekonomi, Politik dan kebijakan pemerintah Kabupaten Balangan tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam perencanaan ini dapat tercapai secara optimal

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Paringin, Juli 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Balangan

**NOOR ASPARIAH, SP. MP**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19660613 199802 2 003